

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dinamika hubungan luar negeri Filipina sudah dimulai sejak menjadi negara yang berdaulat tahun 1946. Presiden Manuel Acuña Roxas yang menjabat saat itu memperlihatkan pengaruh Amerika Serikat terhadap pola kebijakan luar negeri Filipina. Seperti lahirnya *Bell Trade Act* Tahun 1946 yang merupakan kesepakatan-kesepakatan antara Filipina dengan Amerika Serikat terkait pengakuan kemerdekaan Filipina, pembangunan pangkalan militer Amerika Serikat di Filipina, serta terbentuknya suatu hubungan perdagangan antara kedua negara yang dipertegas dalam perjanjian *Laurel-Langley Agreement*. Selain itu juga dikeluarkan suatu larangan perkembangan paham komunis di Filipina hingga larangan kepada masyarakat Filipina untuk melakukan perjalanan ke Tiongkok.<sup>1</sup>

Pengaruh Amerika Serikat terhadap Filipina terus terlihat hingga kepemimpinan Presiden Benigno Aquino III (2010-2016). Walaupun pada pemerintahan sebelumnya pernah terjadi keretakan hubungan, seperti Masa Presiden Marcos yang terjadi pembatalan *Laurel-Langley Agreement* akibat Filipina yang mulai membuka hubungan dengan Tiongkok. Kehadiran Tiongkok dalam hubungan

---

<sup>1</sup>Bobby M, Tuazon, "The Highs and Lows of Philippines-China relations: Current Situation and Prospects", *Institute of Southeast Asian Studies*, 2014, Hal. 4

Filipina tidak begitu memberikan pengaruh terhadap posisi Amerika Serikat sebagai negara mitra utama bagi Filipina.<sup>2</sup>

Disisi lain, hubungan antara Filipina dengan Tiongkok justru mengarah kepada kondisi yang memanas pada Kepemimpinan Presiden Aquino III. Kedua negara terlibat konflik terkait permasalahan Laut Tiongkok Selatan. Pada tahun 2014, Filipina membawa permasalahan Laut Tiongkok Selatan ini ke Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag, Belanda. Mahkamah Arbitrase menyatakan jika hak eksklusif di Laut Barat Filipina yang merupakan bagian dari Laut Tiongkok Selatan dimiliki oleh Filipina. Dalam keputusan ini juga dinyatakan bahwa pulau buatan dan eksplorasi minyak Tiongkok adalah tindakan yang melanggar kedaulatan Filipina.<sup>3</sup>

Tiongkok kemudian memberikan respon terhadap keputusan mahkamah Arbitrase Internasional tersebut dengan mengeluarkan Buku Putih yang berjudul *“China Adheres to the Position of Settling through Negotiation the Relevant Disputes between Cina and the Phillipines in the South Cina Sea”*. Buku Putih ini menegaskan tentang hak Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan serta mengingatkan negara-negara di luar kawasan Laut Tiongkok Selatan agar menghormati negara-

---

<sup>2</sup> Betino Lim, “The Political Economy of Philippines-China Relations”, *Philippine APEC Study Center Network (PASCN)*, 1999, Hal.8

<sup>3</sup>BBC Indonesia, “Apa pengaruh putusan Mahkamah Arbitrase soal Laut Cina Selatan”, [http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/07/160711\\_dunia\\_filipina\\_cina\\_mahkamah\\_preview](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/07/160711_dunia_filipina_cina_mahkamah_preview) (Diakses pada 5 Desember 2017)

negara yang berada dalam kawasan demi terjaganya stabilitas keamanan di Laut Tiongkok Selatan.<sup>4</sup>

Hubungan Filipina dan Tiongkok terkait permasalahan yang melibatkan kedua negara di Laut Tiongkok Selatan memasuki babak baru pada pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte (2016-Sekarang). “*Real change, this is the direction of our government*” disebut Rodrigo Duterte dalam pidatonya saat dilantik sebagai Presiden. Presiden Duterte bertekad membawa perubahan di Filipina, baik secara domestik maupun yang berhubungan dengan kebijakan politik luar negerinya. Dalam hubungannya dengan Tiongkok, Filipina lebih akomodatif dibandingkan pemerintahan sebelumnya.<sup>5</sup> Hal ini dapat dilihat melalui upaya penyelesaian konflik Laut Tiongkok Selatan yang ditawarkan Filipina dinilai cenderung lebih damai di bawah kepemimpinan Presiden Duterte. Presiden Duterte menggunakan cara-cara seperti mempromosikan semangat perdamaian dan kepentingan stabilitas kawasan, serta hubungan bilateral dengan Tiongkok yang lebih banyak dilakukan cara dialog dan negosiasi. Cara-cara damai yang ditawarkan oleh Presiden Duterte di respon positif oleh Tiongkok dengan menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Filipina.<sup>6</sup> Sepanjang sejarah hubungan Filipina dengan Tiongkok, sosok Presiden Duterte yang dinilai menjadi harapan baru bagi hubungan baik kedua negara.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup>Erlinda Matondang, “Natuna Pasca Keputusan Arbitrase Internasional” *Jurnal Hubungan Luar Negeri*, Vol 2 No 1, 2016, Hal.11

<sup>5</sup>Ign.L. Adhi Bhaskara, “Rodrigo Duterte Menangi Pemilu Presiden Filipina”, 10 mei 2016, <https://tirto.id/rodgrigo-duterte-menangi-pemilu-presiden-filipina-8KZ> (Diakses pada 22 Januari 2019)

<sup>6</sup>Erlinda Matondang, Hal. 13

<sup>7</sup>Erlinda Matondang, Hal. 14

Pada pemerintahan Presiden Duterte, arah kebijakan luar negeri Filipina mengalami perubahan arah yang berbanding terbalik. Filipina di bawah kepemimpinan Duterte memilih untuk mengakhiri hubungan latihan militer dengan Amerika Serikat dan memutuskan untuk menjalin hubungan baik dengan Tiongkok pasca ketegangan hubungan terkait Laut Tiongkok Selatan. Perubahan arah kebijakan luar negeri Filipina ditandai dengan kunjungan Duterte ke Tiongkok sebagai sebuah rencana dalam hubungan baik kedua negara.<sup>8</sup>

Pernyataan Presiden Duterte terkait hubungan dengan Amerika Serikat maupun hubungan baru dengan Tiongkok disampaikan di Beijing saat menghadiri pertemuan dengan 200 pebisnis Tiongkok pada oktober 2016. Adapun pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:

*“In this venue, your honors, in this venue, I announce my separation from United State, both in military, not maybe social, but economic also, American has lost”<sup>9</sup>*

Pola perubahan dalam hubungan Tiongkok dan Filipina terlihat dengan rencana kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara melalui rencana proposal pencarian minyak di lepas pantai Filipina, kerjasama militer, serta bantuan Infrastruktur.<sup>10</sup> Dalam proposal pencarian minyak dilepas pantai Filipina, tiga perusahaan pengeboran minyak lepas pantai milik Tiongkok termasuk perusahaan

---

<sup>8</sup> BBC. “Duterte ke Cina, Sinyal Filipina ‘Jauhi Amerika Serikat’”, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/10/161020> (Diakses pada 24 Februari 2019)

<sup>9</sup> Ben Blanchard, “Duterte aligns Philippines with China, says U.S. has lost”, <https://www.reuters.com/article/us-china-philippines-idUSKCN12K0AS> (Diakses pada 13 Maret 2019)

<sup>10</sup> VOA Indonesia, “Hubungan membaik, China Tingkatkan Bantuan Kepada Filipina”, <https://www.voaindonesia.com/a/china-tingkatkan-bantuan-kepada-filipina-/4063646.html> (Diakses pada 24 Februari 2019)

pengeboran minyak lepas pantai milik negara Tiongkok sendiri yakni *China National Offshore Oil Corporation (CNOOC)* yang menunggu persetujuan dari pemerintah Filipina untuk melakukan pencarian cadangan minyak seluas 7.120 km persegi di laut lepas pantai bagian barat Filipina. Kerjasama militer juga dilakukan dalam melawan pemberontak muslim di Filipina. Tiongkok menyumbang sekitar 300 senapan serbu serta 3 juta peluru untuk militer Filipina guna menumpas kelompok Maute yang merupakan pemberontak ISIS.<sup>11</sup> Perkembangan hubungan antara kedua negara ini semakin dikuatkan dengan kunjungan Presiden Tiongkok yakni Xi Jinping pada Selasa 20 November 2018. Kunjungan ini bertujuan untuk pemberian investasi jutaan dolar dan pinjaman lunak guna berbagai pengembangan infrastruktur untuk Filipina.<sup>12</sup>

Kondisi yang dipaparkan di atas menunjukkan sebuah perubahan pola dalam hubungan bilateral antara Filipina dengan Tiongkok yang berkorelasi baik terhadap hubungan kedua negara. Berangkat dari Kondisi tersebut, penelitian ini melihat apa kepentingan nasional Filipina terhadap hubungan bilateral dengan Tiongkok.

---

<sup>11</sup>VOA Indonesia, "Hubungan membaik, China Tingkatkan Bantuan Kepada Filipina", <https://www.voaindonesia.com/a/china-tingkatkan-bantuan-kepada-filipina-/4063646.html> (Diakses pada 24 Februari 2019)

<sup>12</sup>Erwan Handoko, "Kunjungi Filipina, Presiden China bahas soal Investasi dan Pinjaman", <https://internasional.kompas.com/read/2018/11/20/13582951/kunjungi-filipina-presiden-china-bahas-soal-investasi-dan-pinjaman> (Diakses pada 24 Februari 2019)

## **1.2 Rumusan Masalah**

Fluktuasi hubungan bilateral antara Filipina dan Tiongkok sudah dimulai sejak awal kemerdekaan Filipina. Dimulai dari hubungan yang tidak baik dengan Tiongkok di bawah kepemimpinan Presiden Roxas, mulai membuka hubungan bilateral di bawah kepemimpinan Presiden Marcos, kemudian berkembang pesat pada masa pemerintahan Presiden Arroyo, hingga hubungan ini memanas dimasa pemerintahan Presiden Aquino III terkait permasalahan Laut Tiongkok Selatan yang berbuntut panjang. Selanjutnya kepemimpinan Presiden Duterte melalui kebijakannya mencerminkan pola hubungan bilateral antara Filipina dan Tiongkok mengarah pada perbaikan dalam hubungan kedua negara. Berangkat dari perubahan pola dalam kebijakan yang dikeluarkan Presiden Duterte tersebut, penelitian ini melihat apa kepentingan nasional Filipina terhadap hubungan bilateral dengan Tiongkok ini.

## **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah mengapa Filipina melakukan perubahan dalam hubungan bilateralnya dengan Tiongkok?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa Filipina melakukan perubahan dalam hubungan bilateralnya dengan Tiongkok.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua elemen dan orang-orang yang memiliki kepentingan ataupun yang berminat pada permasalahan yang ditulis oleh peneliti sehingga tulisan ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi. Secara khususnya tulisan ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara akademis diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian Ilmu Hubungan Internasional khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri suatu negara.
2. Menambah referensi dan kepustakaan Ilmu Hubungan Internasional dalam bidang kajian kebijakan luar negeri, yang mana kebijakan luar negeri suatu negara memiliki arah tersendiri dan tidak menutup kemungkinan terjadinya perubahan arah kebijakan luar negeri tersebut.
3. Secara umum penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan bagi pemerintah terkait isu yang sedang diteliti.

## 1.6 Studi Pustaka

Dalam penelitian yang sedang diangkat pada kali ini, peneliti menggunakan beberapa bahan rujukan yang berupa jurnal dan penelitian terdahulu sebagai acuan untuk menganalisa dan membahas permasalahan yang sedang diangkat. Peneliti menggunakan tulisan dari Setyasih Harini yang berjudul *Kepentingan Nasional*

*China Dalam Konflik Laut China Selatan.*<sup>13</sup> Dalam tulisan ini Setyasih membahas dari awal mengenai bagaimana sejarah dan perkembangan dari jalannya konflik yang ada di Laut Tiongkok Selatan yang melibatkan beberapa negara pantai seperti Malaysia, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam bahkan juga Indonesia. Dalam tulisan ini Setyasih mencoba melihat perilaku Tiongkok dalam bertindak di konflik Laut Tiongkok Selatan dengan menggunakan konsep kepentingan nasional menurut Daniel S. Papp yang melihat perilaku Tiongkok ini didasari oleh beberapa faktor pendukung seperti keterikatan historis, klaim budaya, dan terutama pada bagian territorial yang dianggap masih berada dalam wilayah kekuasaan negara mereka.

Selain itu dalam tulisan ini Setyasih juga memaparkan bagaimana strategi politik luar negeri Tiongkok yang terkesan agresif dikarenakan kejadian sejarah yang melibatkan disintegrasi antara Taiwan dan Tiongkok, sehingga Tiongkok merasa perlu untuk mengamankan kepentingan mereka terutama dalam perebutan wilayah kepulauan Spratly yang juga melibatkan negara Filipina yang menjadi salah satu fokus dalam penelitian yang sedang diangkat oleh peneliti saat ini. Adapun alasan peneliti menjadikan tulisan dari Setyasih Harini menjadi rujukan dalam proses penelitian kali ini, dikarenakan peneliti merasa perlu untuk membahas jalannya konflik Laut Tiongkok Selatan yang melibatkan Tiongkok dan Filipina di dalamnya. Adapun perbedaan tulisan dari Setyasih Harini dengan permasalahan yang sedang diangkat oleh peneliti saat ini terletak pada fokus permasalahan yang dibahas, yang

---

<sup>13</sup> Setyasih Harini, "Kepentingan China Dalam Konflik Laut China Selatan", *Universitas Slamet Riyadi Surakarta*



mana Setyasih hanya membahas apa kepentingan Tiongkok dalam konflik Laut Tiongkok Selatan sedangkan peneliti mencoba melihat bagaimana perubahan pola hubungan antara Tiongkok dan Filipina pasca konflik Laut Tiongkok Selatan.

Penelitian selanjutnya yaitu tulisan dari Desi Annisa Putri yang berjudul “*Kepentingan Vietnam di Konflik Laut Cina Selatan dalam Teori Kepentingan Nasional*”.<sup>14</sup> Dalam tulisannya ini Desi menjelaskan bahwa Laut Tiongkok Selatan merupakan salah satu permasalahan yang penting bagi Vietnam. Dimana Laut Tiongkok Selatan penting sebagai jalur pelayaran dan memiliki kandungan energi yang melimpah. Adapun kepentingan yang dimiliki Vietnam dalam keikutsertaan dan klaimnya terhadap beberapa pulau yaitu Spartly dan Paracel adalah kepentingan nasional Vietnam terkait energi yang dimiliki wilayah tersebut. Demi mewujudkan kepentingan tersebut, Vietnam telah melakukan berbagai cara mulai dari diskusi dalam forum ASEAN maupun bekerjasama dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat untuk memperkuat klaimnya terhadap wilayah tersebut.

Dalam penelitian ini, didapatkan bahwa permasalahan perebutan hak atas Spartly dan Paracel didasari oleh pemerintahan kolonial pada masa itu tidak dapat menentukan batasan atas yurisdiksi suatu negara di kepulauan tersebut. Kurangnya teknologi menjadi kendala kedua negara tersebut untuk mengukur dan menentukan batas negara dalam Area tersebut. Penelitian ini memberikan sumbangsih pada penelitian peneliti dalam melihat bagaimana hubungan antara negara-negara yang

---

<sup>14</sup> Desi Annisa Putri, “Kepentingan Vietnam di Konflik Laut Cina Selatan dalam Teori Kepentingan Nasional”, dalam *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Universitas Komputer Indonesia*: Bandung.

berbatasan langsung dengan Laut Tiongkok Selatan, apa kepentingan negara tersebut di Laut Tiongkok Selatan ini, serta bagaimana negara-negara tersebut mampu memperoleh kepentingannya tersebut.

Selanjutnya tinjauan pustaka yang digunakan adalah tulisan dari Tengku Difari Akbar yang berjudul *Upaya Turki dalam Pemulihan Hubungan Diplomatik dengan Israel 2016*.<sup>15</sup> Dalam tulisan ini Difari menjelaskan bahwa Turki dan Israel telah menjalin hubungan diplomatik yang cukup lama, hubungan kedua negara diawali dengan Turki menyatakan kedaulatan Israel pada Maret 1949. Namun pada tahun 2010, terjadi konflik antara Israel dan Palestina setelah adanya serangan Mavi Marmara di Perairan Gaza yang menimbulkan banyaknya warga negara Turki yang menjadi korban dari tragedi tersebut. Hal ini menimbulkan kemarahan Pemerintah Turki dan mengecam tindakan Israel dengan menghentikan segala kerjasama yang telah dilakukan kedua negara termasuk kerjasama dibidang ekonomi dan Militer. Turki juga mengusir Duta Besar Israel dari negaranya serta menarik Duta Besar nya dari Israel.

Dalam tulisannya ini, Difari juga memaparkan bahwa Turki dan Israel sepakat untuk melakukan normalisasi hubungan diplomatik pada tahun 2016. Upaya Turki untuk memperbaiki hubungan karena kondisi ekonomi Turki yang memerlukan mitra dagang dalam mendorong perekonomiannya. Selain itu kondisi militer Turki yang bisa dikatakan belum cukup, memerlukan bantuan Israel dalam membantu dan

---

<sup>15</sup> Tengku Difari Akbar, "Upaya Turki dalam Pemulihan Hubungan Diplomatik dengan Israel 2016" Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017

melengkapi kebutuhan persenjataan militer turki. Peneliti menjadikan tulisan Difari ini menjadi bahan rujukan dikarenakan adanya kesamaan sikap suatu negara yang dianalisis, yaitu mengapa suatu negara melakukan perubahan dalam hubungan dengan negara lain yang sebelumnya sempat terlibat dalam suatu konflik atau permasalahan. Sedangkan perbedaan antara tulisan Difari di atas dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti saat ini adalah pada negara yang menjadi fokus penelitian.

Tulisan selanjutnya yang peneliti jadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian saat ini adalah tulisan Maulidina Rahmi yang berjudul *Motivasi Vietnam melakukan Kerjasama Militer dengan Amerika Serikat dalam Mengelola Ancaman Keamanan Laut Cina Selatan*.<sup>16</sup> Dalam tulisan ini Maulidina memaparkan bahwasanya Vietnam dan Amerika Serikat memiliki sejarah konflik pada masa perang dingin khususnya pada periode 1954-1975 yang dikenal dengan perang Vietnam. Namun hubungan antara Vietnam dengan Amerika Serikat mulai membaik pada tahun 1987 dan secara resmi kedua negara menyatakan perbaikan hubungan pada tahun 1991. Normalisasi hubungan kedua negara diikuti dengan kerjasama diberbagai aspek termasuk kerjasama militer. Dalam tulisannya, Maulidina juga menjelaskan bahwasanya kerjasama militer antara Vietnam dengan Amerika Serikat ini mendapat respon dari Tiongkok yang menolak kehadiran Amerika Serikat yang dianggap Tiongkok memicu konflik di kawasan Laut Tiongkok Selatan.

---

<sup>16</sup> Maulidina Rahmi, "Motivasi Vietnam melakukan Kerjasama Militer dengan Amerika Serikat dalam Mengelola Ancaman Keamanan Laut Cina Selatan", *Jurnal FISIP*, Vol 3 No.2, 2016

Tulisan Maulidina di atas dirasa perlu menjadi bahan rujukan pada penelitian saat ini dikarenakan dapat membantu peneliti melihat bagaimana negara yang dulunya pernah memiliki sejarah konflik, akhirnya menjalin suatu kerjasama yang dimulai dengan normalisasi hubungan yang tentu saja memunculkan protes dan dukungan dari negara lainnya. Adapun perbedaan tulisan Maulidina tersebut dengan penelitian yang dilakukan saat ini yaitu, Maulidina memaparkan normalisasi hubungan antara Vietnam dengan Amerika Serikat yang mendapat penolakan dari Tiongkok. Sebaliknya penelitian saat ini adalah melihat perubahan dalam hubungan bilateral Filipina dengan Tiongkok.

Rujukan selanjutnya dalam penelitian ini adalah jurnal dari Hilyatul Awaliah dengan judul *Upaya Pemerintah Turki dalam Memulihkan Hubungan Bilateral dengan Rusia Pasca Insiden Penembakan Pesawat Tempur SU-24 Tahun 2015-2016*.<sup>17</sup> Jurnal ini menjelaskan tentang upaya pemulihan hubungan Turki dengan Rusia pasca penembakan pesawat tempur SU-24 yang terjadi di perbatasan Suriah dengan Turki pada 24 November 2015. Tindakan Turki membuat Rusia geram dan kecewa hingga merespon insiden tersebut dengan memberlakukan sanksi ekonomi kepada Turki, Rusia memberlakukan pelarangan perdagangan, pemutusan pariwisata, penangguhan bebas visa, pelarangan dan pembatasan transportasi, pemutusan kerjasama energi gas dan larangan terhadap perusahaan dan warga Turki. Sanksi ekonomi tersebut tentu saja memberikan dampak buruk bagi perekonomian Turki

---

<sup>17</sup> Hilyatul Awaliah, "Upaya Pemerintah Turki dalam Memulihkan Hubungan Bilateral dengan Rusia Pasca Insiden Penembakan Pesawat Tempur SU-24 Tahun 2015-2016" *Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta*, 2017

hingga akhirnya Turki melakukan upaya-upaya pendekatan untuk memulihkan kembali hubungan bilateralnya dengan Rusia. Upaya-upaya yang dilakukan Turki adalah dengan melakukan pernyataan permintaan maaf serta pernyataan belasungkawa kepada Rusia atas meninggalnya awak pesawat tempur SU-24. Selain itu, Turki juga melakukan kunjungan ke Rusia dan mengadakan pertemuan antar masing-masing pemimpin negara untuk mencapai kesepakatan guna memulihkan hubungan yang sempat merenggang antara kedua negara.

Peneliti merasa jurnal yang ditulis Maulidina ini perlu menjadi salah satu bahan rujukan penelitian untuk melihat indikator-indikator yang dilakukan Turki dalam memulihkan hubungannya dengan Rusia, yang nantinya dalam penelitian yang sedang diteliti dan juga dijelaskan indikator apa saja yang dilakukan Filipina dalam memperbaiki hubungannya dengan Tiongkok. Adapun perbedaan jurnal di atas dengan penelitian kali ini adalah terletak pada negara yang menjadi fokus penelitian yang nantinya dianalisis.

## **1.7 Kerangka Konseptual**

### **Kepentingan Nasional**

Kepentingan Nasional merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari negara, dan menjadi faktor yang menentukan politik luar negeri dari negara tersebut. Menurut Rochester, terdapat dua asumsi yang muncul dalam konsepsi kepentingan nasional yaitu :

*“There exist and objectively determinable collective interest which all individual members within a given national society share equally, and this collective transcends any interest that a particular subset of those individuals may share with individuals in other national societies”.*<sup>18</sup>

Secara umum kepentingan nasional dapat diartikan sebagai sesuatu yang melekat pada negara yang dipengaruhi oleh kepentingan kolektif dari masyarakat negara itu sendiri, kemudian kepentingan kolektif suatu negara ini bisa dibagi kepada negara lain.<sup>19</sup>

James E Hyndmand juga menjelaskan bahwa kepentingan nasional suatu negara mencerminkan objektifitas power suatu negara yang terdiri dari kebutuhan minimum, identitas budaya, yang tidak bertahan lama dan bukan sesuatu yang terlalu penting dari kelompok kepentingan yang bervariasi.<sup>20</sup> Penjelasan tersebut diperkuat dengan pendapat Morgenthau yaitu :

*“National interest, expressing itself in terms of power objectives, comprises a fixed, minimum require-cultural identity—and variable, less durable, and less essential demands of interest groups”.*<sup>21</sup>

Selanjutnya Clinton juga menjelaskan bahwa kepentingan nasional dapat dibagi kedalam dua aspek, yaitu kepentingan nasioal yang mengesampingkan keegoisan dan individualitas. Lalu kepentingan nasional yang dianggap sebagai

---

<sup>18</sup> J. Martin Rochester.” The National Interest and Contemporary world politics”. The review of Politics Vol. 40 No.1. 1978. Hal. 79

<sup>19</sup> J. Martin Rochester. Hal 80

<sup>20</sup> James E Hyndmand. “National Interest and the new look” International Journal. Vol. 26 No.1. 1971. Hal. 13

<sup>21</sup> <sup>21</sup> James E Hyndmand. Hal. 10

prinsip diplomasi yang dimiliki negara untuk memperjuangkan kepentingan bersama.<sup>22</sup>

Terkait dengan penelitian ini, peneliti menggunakan konsep Kepentingan Nasional yang dikemukakan oleh G.R. Berridge dalam buku yang berjudul *Diplomacy, Second Edition: Theory and Practice*.<sup>23</sup> Dijelaskan pada buku tersebut bahwa dalam melihat kepentingan nasional suatu negara pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam beberapa aspek, yaitu aspek ideologi, aspek politik, dan aspek ekonomi.

a. Ideologi

Ideologi yang diartikan sebagai dasar atau landasan menjadi penentu suatu negara dalam merumuskan kebijakan-kebijakan luar negeri negara tersebut. Dengan mempertahankan ideologinya, suatu negara mampu bertahan dari segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang datangnya dari luar maupun dari dalam negara tersebut, sehingga secara langsung maupun tidak langsung memperlihatkan adanya aspek-aspek yang menjadi identitas suatu negara. Melalui identitas tersebut kemudian dapat dirumuskan apa yang menjadi target dan sejauh mana target tersebut dapat terpenuhi.

---

<sup>22</sup> William David Clinton. "The National Interest: Normative Foundations" *The Review of Politics* Vol 48 No. 1. 1986. Hal. 80

<sup>23</sup>G. R. Berridge "Diplomacy, Second Edition: Theory and Practice", *Palgrave Studies in Diplomacy Series*, 2002, Hal. 150

b. Politik

Aspek politik ini memperlihatkan bagaimana kepentingan nasional suatu negara tergantung pada sistem pemerintahan negara itu sendiri, yang bisa dilihat sebagai sejarah politik maupun tradisi politik negara tersebut, hingga negara-negara yang menjadi mitra dalam hubungan diplomatik yang dijadikan tolak ukur bagaimana negara tersebut akhirnya memutuskan untuk menjalin suatu kerjasama dengan negara lain.

c. Ekonomi

Perkembangan pola hubungan yang terjadi antara suatu negara dengan negara lain, pada akhirnya dapat memperlihatkan bagaimana target-target yang ingin dicapai suatu negara yang disusun dalam sebuah gagasan tentang kepentingan nasional memiliki nilai ekonomi. Sehingga dalam hubungan bilateral misalnya, dapat terlihat sebuah tujuan bagaimana suatu negara mendapatkan keuntungan secara ekonomi dari negara lainnya.

Dari ketiga aspek yang dijelaskan di atas, kepentingan nasional Filipina melalui kebijakan Presiden Duterte yang melakukan perubahan hubungan dengan Tiongkok dapat dilihat dari aspek ideologi, politik, maupun ekonomi yang nantinya dijabarkan satu persatu.



## 1.8 Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu metode yang lebih menekankan pada proses daripada hasil sehingga peneliti tertarik kepada proses, tujuan, maksud, dan memahami gejala kata-kata atau gambar.<sup>24</sup>

### 1.8.1 Pendekatan dan jenis penelitian

Metode kualitatif dipilih dalam penelitian ini guna menjelaskan data-data yang didapat berupa tulisan ilmiah dan pemaparan pelaporan serta tindakan yang tergambar di dalam tulisan-tulisan tersebut.<sup>25</sup> Selain itu, melalui metode penelitian ini, peneliti juga menjelaskan data terkait berita yang didapat dari sumber berita yang terpercaya. Jenis penelitian yang sesuai dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dimana analisis dilakukan dengan mengkaji fenomena yang diangkat menjadi lebih rinci.<sup>26</sup>

### 1.8.2 Batasan Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini melihat pola dan kebijakan luar negeri Filipina yang mulai berubah pada pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte. Sehingga batasan waktu dalam penelitian ini dimulai dari tahun 2016 sampai tahun 2018. Alasan memilih batasan penelitian ini adalah karena tahun 2016 menjadi awal kepemimpinan Presiden Duterte yang mulai mengeluarkan kebijakan tentang

---

<sup>24</sup> John W. Creswell, "Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methode Approach", *United Kingdom: Sage Publications*, 2013. Hal. 173

<sup>25</sup> Iskandar, "Metodologi penelitian pendidikan dan sosial (Kualitatif dan kuantitatif)", *Gaung Persamda Press*, Hal. 186

<sup>26</sup> Iskandar, Hal. 189

perubahan terhadap hubungan dengan Tiongkok. Sementara sebelum tahun 2016 hanya dijadikan sebagai alasan mengapa perlunya sebuah perubahan. Sementara tahun 2018 menjadi tahun direalisasikannya kerjasama antara Filipina dengan Tiongkok di berbagai sektor, sekaligus menjadi batasan akhir penelitian ini.

### **1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis**

Unit analisis merupakan objek yang perilakunya dianalisis, sedangkan unit eksplanasi merupakan objek yang mempengaruhi unit analisis, serta tingkat analisis merupakan tingkatan objek yang menjadi fokus utama dalam sebuah penelitian.<sup>27</sup> Dari paparan di atas, penelitian ini menjadikan negara Filipina sebagai unit analisis yang perilaku dan tindakannya dijelaskan. Kepentingan Nasional Filipina sendiri menjadi unit eksplanasi. Sedangkan level atau tingkat analisis yang digunakan dalam penelitian ini berada pada tingkat negara.

### **1.8.4 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini merupakan penelitian yang didasarkan pada *Library Research* (studi kepustakaan) untuk memperoleh data-data. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data yang telah ada, yaitu data-data yang membahas mengenai *Sejarah Hubungan Bilateral Filipina dengan Tiongkok, Perkembangan Permasalahan Laut Tiongkok Selatan, Dinamika Hubungan Bilateral Filipina dengan Tiongkok*. Data-data tersebut didapatkan melalui jurnal PASCN, JHLN, Sage,

---

<sup>27</sup> Joshua S. Goldstein dan Jon C. Pavehouse, "Level of analysis. Pearson International Edition, International Relation, Eight Edition"

ISAS, dan JSTOR. Disamping itu data juga didapatkan dari buku *Diplomacy, Second Edition: Theory and Practice*. Serta dari *website* resmi pemerintahan Filipina *Philippines Department of Foreign Affairs*.

### **1.8.5 Teknik Analisis Data**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 3 (tiga) tahapan dalam teknik pengolahan dan analisis data. Tahap pertama, peneliti mengumpulkan data terkait sejarah hubungan antara Filipina dan Tiongkok dari beberapa periode pemerintahan negara Filipina. Tahap kedua, peneliti menjabarkan bagaimana konflik Laut Tiongkok Selatan yang melibatkan antara Filipina dan Tiongkok. Lalu pada tahap ketiga, peneliti mengelaborasi permasalahan yang telah disampaikan pada rumusan masalah dengan konseptual yaitu menggunakan Konsep *National Interest* melalui fakta-fakta dari data yang telah ditemukan. Pada tahap ini peneliti menjabarkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Filipina dalam upaya memenuhi kepentingan nasionalnya. Sehingga diharapkan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan dari tiga tahap sebelumnya untuk membentuk suatu pengetahuan baru guna menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.

### **1.9 Sistematika Penulisan**

Hasil dari penelitian ini dituliskan ke dalam 5 (lima) bab. Adapun pembagian kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

## **Bab I Pendahuluan**

Dalam bab ini digambarkan secara keseluruhan permasalahan yang akan diteliti, yang dimulai dari latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, hingga metodologi yang digunakan.

## **Bab II Dinamika Hubungan Luar Negeri Filipina**

Bab ini menjelaskan tentang sejarah hubungan bilateral antara Filipina dan Tiongkok. Serta diulas bagaimana dinamika hubungan bilateral akibat konflik di Laut Tiongkok Selatan.

## **Bab III Kebijakan Filipina Pada Pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte Terhadap Hubungan Bilateral dengan Tiongkok**

Bab ini membahas mengenai kebijakan-kebijakan Filipina yang mempengaruhi hubungan bilateral antara Filipina dengan Tiongkok pada masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte.

## **Bab IV Analisis Kepentingan Nasional Filipina Terhadap Tiongkok Pada Pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte**

Bab ini merupakan analisis tentang bagaimana perubahan kebijakan Presiden Rodrigo Duterte dapat mempengaruhi hubungan bilateral antara Filipina dengan Tiongkok melalui konsep Kepentingan Nasional.

## **Bab V Kesimpulan**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari pembahasan berdasarkan pada pertanyaan penelitian yang diangkat.